

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia selalu serius dalam menunjukkan komitmen terkuat untuk menandatangani perpres 59 tahun 2017 sebagai implementasi tujuan pembangunan yang berkelanjutan presiden Jokowi sebagai pemimpin mengarahkan pembangunan berkelanjutan, Bisa dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang dibentuk pada tanggal 25-27 September 2015 di Markas PBB di New York, yang dihadiri oleh 193 negara. Adanya berlakunya aturan perpres mengenai Sustainable Development Goals (SDGs) ini, maka akan segera dibentuk di bawah Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN). Peraturan presiden (PERPRES) mempersiapkan, mengatur dan saling berkoordinasi, dan selanjutnya membentuk komposisi tim dengan bertanggung jawab masing-masing pihak terkait. Partisipasi selain dari faktor pemerintahan dengan anggota eksekutif, kelompok kerja, kemudian persiapan dokumen yang disiapkan sebagai mengukur kinerja Awal dari perencanaan dan pendanaan Sustainable Development Goals (SDGs) ke Roadmap. rencana nantinya dari implementasinya akan secara menyeluruh ke nasional ataupun turun ke daerah. Di sinilah bisa melihat sasaran nasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik dalam acuan tujuan global

menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan dengan memperkuat upaya untuk melindungi dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.¹

Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia Juga pasti memiliki kendala yang bisa menghambat jalannya program Sustainable Development Goals (SDGs) sampai tahun 2030, terdapat salah satu kendala terkait generasi muda, kesenjangan sosial, good governance. kualitas pada generasi muda yang sangat kurang mengenai pengetahuan strategi pada pembangunan kepemudaan yang bertujuan meningkatkan partisipasi anak muda dalam tujuan Sustainable Development Goals (SDGs).²

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa (PERMENDESA) Nomor 13 tahun 2020 menjadi pedoman bagi 74.953 desa di Indonesia sebagai dasar menyusun rencana kerja dan APBDes tahun 2021, Peraturan tersebut sesuai dengan Peraturan presiden (PERPRES) Nomor 59 tahun 2017 yang berisi tentang bagaimana pelaksanaan dan pencapaian dari pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Terdapat penambahan satu indikator dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PERMENDESA PDTT) No.13 Tahun 2020 sehingga menjadi 18 indikator SDGs

¹ Basiq Fuadi, 'Penataan Perkotaan Di Kabupaten Gresik (Analisis Rpjmd Kabupaten Gresik Dengan Pelaksanaan Perpres No. 59)', *Journal Of Islamic Management*, 2.2 (2022), 119–30 <<https://doi.org/10.15642/jim.v2i2.832>>.

² Mansur Juned, Retno D. Kusumastuti, And Shanti Darmastuti, 'Penguatan Peran Pemuda Dalam Pencapaian Tujuan Ketiga Sustainable Development Goals (Sdgs) Di Karang Taruna Kelurahan Serua, Bojongsari, Depok', *Prosiding Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9 (2015), 1–7. Diakses Dalam <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/pkm/article/view/93>

Desa, pada penambahan tersebut tentang terorganisasinya desa yang dinamis dan budaya yang adaptif.³

Pada penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis mengenai implementasi SDGs Desa sesuai pada indikator yang mana ditetapkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Tahun 2020. Terdapat 13 desa di kecamatan Ujung pangkah yang dimana 13 desa diantaranya telah dilakukan pendataan program Sustainable Development Goals (SDGs). Dan terdapat 2 desa yang memiliki potensi alam dan sedang dikembangkan oleh pemerintah, termasuk pada Desa Sekapuk.

Di Desa Sekapuk telah mengimplementasikan beberapa indikator SDGs desa, yakni desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa yang berkualitas, pembangunan berkelanjutan, desa digital, desa tanggap budaya dan yang terakhir desa ramah perempuan. Indikator- indikator dalam Sustainable Development Goals (SDGs) memiliki keterkaitan satu sama lain dan yang masih menjadi masalah utama adalah kemiskinan, kemiskinan yang mana menjadi salah satu masalah yang penting apabila masalah kemiskinan bisa terselesaikan maka kekurangan dalam indikator yang lain dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penelitian ini terdapat alasan tersendiri untuk memilih program SDGs dibandingkan program pemerintah yang lain, karena Desa Sekapuk yang

³ Zaki Arianto And Adde Marup Wirasenjaya, 'Upaya Pemerintahan Joko Widodo Dalam Mendorong Implementasi Sustainable Development Goals', *Repository Umy*, 2019, 1–17 <[Http://Repository.Umy.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/18987/11.Jurnal.Pdf?Sequence=1](http://Repository.Umy.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/18987/11.Jurnal.Pdf?Sequence=1)>.

mana telah menerapkan konsep Sustainable Development Goals (SDGs) dengan perencanaan yang baik, dengan implementasinya yang melibatkan dari berbagai pihak serta peran dari masyarakat, namun masih terdapat banyak kendala yang dialami, hasil akhir yang diharapkan dengan mengimplementasikan (SDGs) dapat mengembangkan pembangunan di Desa Sekapuk dengan terus melakukan perbaikan rencana yang telah berjalan maupun pada indikator lain yang masih belum terimplementasi.

Kemiskinan Desa Sekapuk sendiri yang mana pada akhir tahun 2017 tercatat dalam Index Desa Membangun (IDM) 0.55%, yang mana Desa Sekapuk memiliki banyak permasalahan dari kemiskinan serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tidak berkembang, kemiskinan di Desa Sekapuk sendiri diakibatkan oleh potensi desa yang belum dimanfaatkan secara optimal. Belum terkelolanya potensi desa secara maksimal yang membuat masyarakat desa ada yang memilih untuk menjadi buruh migran baik itu laki-laki maupun perempuan untuk mendapatkan sebuah pekerjaan dengan gaji yang layak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan yang Telah dipaparkan melalui latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang diangkat adalah

“Bagaimana strategi pemerintah Kabupaten Gresik dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) poin ke-1 yaitu, tanpa kemiskinan di Desa Sekapuk?”

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan dari program sustainable development goals oleh pemerintah Kabupaten Gresik dalam mengurangi kemiskinan, sehingga dapat mengukur bagaimana kesiapan pemerintah Kabupaten Gresik dalam mengimplementasikan Sustainable Development Goals (SDGs) poin ke-1 pada wilayah tersebut.
- b. Serta menganalisis pada tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik dengan berfokus pada indikator-indikator seperti pada tingkat pendapatan, akses kesehatan, akses pekerjaan dan akses pendidikan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada dua manfaat yang bisa didapatkan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Manfaat akademis

Diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan menambah wawasan referensi bagi penulis dan juga sebagai bahan kajian dan penelitian khususnya untuk mengurangi kemiskinan dalam program Sustainable Development Goals (SDGs) yang di jalankan pemerintah Kabupaten Gresik.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagaimana mengenai situasi kemiskinan di Desa Sekapuk, hal ini bisa membantu pemerintah setempat untuk mengidentifikasi penyebab dari kemiskinan dan merancang program intervensi yang lebih efektif.

1.4 Penelitian Terdahulu

Peneliti menyadari bahwa perlu adanya beberapa kajian terdahulu yang juga berkaitan dengan penulisan penelitian ini sebagai referensi. Penelitian yang pertama dilakukan oleh **Ishartono dan Santoso Tri Raharjo** dengan judul penelitian “Sustainable Development Goals (SDGs) Dan Pengentasan Kemiskinan” pada tahun penelitian 2020, menggunakan jenis penelitian deskriptif, dan alat analisis menggunakan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, yang mana penelitian ini membahas Problem kemiskinan sangat terkait dengan pekerjaan sosial. Profesi ini telah berjuang dan terlibat dalam memerangi kemiskinan selama berabad-abad. Secara historis, dapat dikatakan bahwa masalah kemiskinan adalah inspirasi bagi profesi Pekerjaan Sosial. Bahkan, profesi ini menempatkan kemiskinan sebagai salah satu fokus Pekerjaan Sosial. Pekerjaan Sosial harus berada di depan dalam memerangi kemiskinan jika benar-benar mempertahankan Hak-Hak Asasi Manusia. Tujuan pembangunan jangka panjang, seperti Millenium Development Goals (MDGs), yang kemudian diubah menjadi

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) membutuhkan kerja sama antar lembaga vertikal dan horizontal.⁴

Penelitian yang kedua ini dilakukan oleh **Dudi Septiadi Dan Muhammad Nursan**. Dengan judul pengentasan kemiskinan Indonesia: analisis indikator makro ekonomi dan kebijakan pertanian, dilakukan pada tahun 2020. Metode yang digunakan pada penelitian adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini mengenai perkembangan kemiskinan Indonesia bahwa Tingginya angka kemiskinan dipicu oleh apresiasi nilai tukar rupee terhadap dolar. Perusahaan dengan utang dolar harus menghadapi kenyataan ini. Perusahaan bertanggung jawab mengeluarkan biaya yang lebih tinggi untuk melunasi utangnya. Oleh karena itu, banyak usaha skala kecil Perusahaan-perusahaan besar mulai bangkrut. Jadi efek dominonya adalah gelombang PHK dan kenaikan inflasi. PHK massal dan harga tinggi menyebabkan jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan semakin meningkat. Tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan namun panda nilai penurunannya mengalami perlambatan., akan tetapi pada tingkat ketimpangan Distribusi pendapatan Indonesia sebenarnya mengalami peningkatan dan Termasuk dalam kategori ketimpangan Kritis. jika ketimpangan terus berlanjut Jika hal ini terjadi secara ekstrem, maka hal itu akan terjadi Semakin tinggi angkanya Selalu saja orang-orang miskin. penduduk awal yang miskin atau petani Melarikan diri dari jerat menjadi semakin sulit miskin.⁵

⁴ Barry D. Solomon, 'Sustainable Development Goals (Sdgs)', *Dictionary Of Ecological Economics: Terms For The New Millennium*, 0042 (2023), 526–27 <<https://doi.org/10.4337/9781788974912.S.104>>.

⁵ Makroekonomi Dan And Others, 'Pengentasan Kemiskinan Indonesia : Analisis Indikator', February, 2020 <<https://doi.org/10.36423/Hexagro.V4i1.371>>.

Selanjutnya penelitian yang ketiga oleh **Adi Nawir, Syamsuddin dan Jusniaty**. Dengan judul penelitian Penerapan Program Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Polewali Dalam Mengurangi Kemiskinan pada tahun 2022, jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi dan alat analisis yang digunakan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Mendapat hasil penelitian dari program Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Polewali telah diterapkan sesuai dengan surat edaran Kementerian Desa tentang pelaksanaan Program Sustainable Development Goals (SDGs). Meskipun program ini masih dalam tahap perencanaan, masyarakat Desa Polewali masih belum merasakan hasil implementasi Sustainable Development Goals (SDGs), tetapi SDGs telah dilaksanakan dengan baik. Dengan mempertimbangkan fakta bahwa pemerintah desa memberikan pendataan langsung kepada masyarakat, dengan pembaharuan data setiap tiga bulan, pendataan ini akan menjadi acuan bagi pemerintah desa untuk membuat perencanaan desa, mulai dari perencanaan pembangunan dan rencana untuk menangani kemiskinan secara khusus.⁶

Artikel jurnal yang keempat oleh **Tantyo Nandi Purwoko** dengan judul “Implementasi Program Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Bandar Lampung” penelitian yang dilakukan pada tahun 2023. jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

⁶ Adi Nawir, Syamsuddin Syamsuddin, And Jusniaty Jusniaty, ‘Penerapan Program Sustainable Development Goals (Sdgs) Desa Polewali Dalam Mengurangi Kemiskinan’, *Demokrasi*, 1.3 (2022), 1–18 <<https://doi.org/10.36269/dmkr.v1i3.784>>.

penelitian Deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan alat analisis mengolah data berupa program-program Sustainable Development Goals (SDGs) di Kota Bandar Lampung, garis kemiskinan di Kota Bandar, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks kepadatan kemiskinan di Kota Bandar Lampung, Memperoleh hasil yakni : mengenai program Sustainable Development Goals (SDGs) yang mana sebagai acuan sebagai program penanggulangan kemiskinan di Kota Bandar Lampung kurang berhasil. Yang mana hal itu disebabkan oleh sumber daya manusia yang ada sudah baik namun belum sempurna menuju program Sustainable Development Goals (SDGs) sehingga nantinya ada perbaikan yang diperlukan agar bisa berjalan dengan implementasi yang dilakukan.⁷

Pada penelitian yang kelima oleh **Ghulam Zakiyyan Dzulqarnain, Dine Meigawati dan Yana Fajar Basori** dengan judul Implementasi Program Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Sukabumi pada tahun 2022 dengan jenis penelitian deskriptif dan alat analisis menggunakan rancangan non probability sampling dengan teknik snowball sampling. Snowball sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Mendapat hasil dari penelitiannya pada pelaksanaan program SDGs di ketahui oleh para pelaksana sehubungan dengan adanya surat keputusan pokja yang dikeluarkan oleh Walikota akan tetapi belum terlalu dipahami mengenai SDGs lebih mendalam sehingga perlu adanya pemahaman lebih lanjut mengenai arti dari SDGs secara komprehensif.

⁷ Tanyo Nandi Purwoko, 'No Implementasi Program Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Bandar Lampung', *Digilib.Unila.Ac.Id*, 2023, 31–41 <https://digilib.unila.ac.id/70890/3/Skripsi_Tanpa_Bab_Pembahasan.Pdf>.

Sumber daya anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan program SDGs ini mengalami beberapa masalah. Salah satunya adalah pandemi COVID-19, yang menyebabkan refokusing anggaran, yang berdampak pada pelaksanaan program SDGs ini. Hal ini berdampak pada sumber daya manusia, yang terbatas dalam jumlah, sehingga pelaksanaan program menggunakan sumber daya manusia seadanya tetapi dengan kualitas yang jauh di atas rata-rata.⁸

Penelitian selanjutnya yaitu oleh **Nanda Bhayu Pratama, Eko Priyo Purnomo** dan **Agustiyara** dengan judul penelitian Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2020 dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan alat analisis yang digunakan dengan pengumpulan data yang bersumber dari buku, jurnal, dan dokumen lain yang relevan. Pembahasan yang diambil dari penelitian ini yaitu, menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan berbagai upaya untuk menghapus kemiskinan yang sejalan dengan SDGs. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan ini melalui beberapa program yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Program-program ini nantinya akan menjadi indikator untuk tercapainya tujuan dalam menghapus kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan secara keseluruhan, dengan asumsi setidaknya setengah dari semua masyarakat yang terdampak kemiskinan menurut definisi nasional; menerapkan sistem perlindungan dan upaya perlindungan sosial untuk

⁸ Ghulam Zakiyyan Dzulqarnain, Dine Meigawati, And Yana Fajar Basori, 'Implementasi Program Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Sukabumi', *Professional: Jurnal Komunikasi & Administrasi Publik*, 9.1 (2022), 109–16. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/view/2505>

semua masyarakat yang terdampak kemiskinan; membangun ketahanan terhadap bencana, peristiwa ekonomi, dan peristiwa sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin; dan, terakhir, memastikan bahwa semua orang memiliki hak yang sama.⁹

Penelitian selanjutnya **Endah Tarwiyani Yuniar, Hermi Susiatiningsih** dan **Fendy Eko Wahyuni**. Dengan judul *Budaya dalam Agenda 2030: Upaya dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals di Kota Pekalongan*, penelitian ini deskriptif. Alat analisis dengan pengumpulan data yang bersumber dari buku, jurnal, dan dokumen lain yang relevan, Hasil penelitian ini ditemukan bahwa kota pekalongan bisa menyesuaikan kebijakan aturan yang disepakati oleh UCCN dengan kata lain Pemerintah Pekalongan patuh terhadap kerja sama yang telah disepakati. Motivasi Pemkot Pekalongan untuk mematuhi UCCN bisa jadi Alasan mengapa peneliti mengatakan hal ini adalah karena tujuan UCCN adalah menjadikan kebudayaan sebagai inti pembangunan. Kota kreatif yang memenuhi ciri khas Kota Pekalongan sebagai kota industri Dikembangkan dari tradisi yang sudah lama ada. Selain itu, tujuan UCCN adalah untuk Sejalan dengan niat Kota Pekalongan untuk mewujudkan kota ekonomi kreatif yang layak Tidak dengan Peraturan Presiden. Rencana Pembangunan Ekonomi Nomor 142 Tahun 2018 Kompetisi Kreatif Nasional 2018-2015. Sebagai anggota UCCN, Pemerintah Kota Pekalongan harus melaksanakannya Semua komitmen dan tugas disepakati. Sesuai dengan komitmen yang disepakati, Anggota harus memperkuat kerja sama dengan

⁹ Nanda Bhayu Pratama, Eko Priyo Purnomo, And Agustiyara, 'Sosiohumaniora: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora Sustainable Development Goals (Sdgs) Dan Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta', *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6.2 (2020), 64–74. <https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/Sosio/Article/View/8045>.

kota-kota yang teridentifikasi Kreativitas sebagai faktor strategis bagi pembangunan berkelanjutan sektor ekonomi, masyarakat, budaya dan lingkungan hidup. Sudah sepantasnya perilaku Pemerintah Kota Pekalongan Melaksanakan tugas yang disepakati melalui berbagai indikator. Hal ini menunjukkan betapa besarnya upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan Menjadikan budaya sebagai inti pembangunan berkelanjutan Tujuan yang ingin dicapai UCCN yaitu, menjadikan kota kreatif dunia bukan untuk etalase tetapi untuk menyejahterakan masyarakat dalam kota tersebut. Indikator keluaran menunjukkan berbagai kebijakan dan peraturan daerah yang berpusat pada pelestarian budaya.¹⁰

Penelitian yang kedelapan oleh **Hastija** dengan judul penelitian strategi pemerintah dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGS) guna pengentasan kemiskinan di Kecamatan Lamasi Kabupaten Lawu. hasil penelitian bahwa strategi pemerintah dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGS) guna pengentasan kemiskinan di Kecamatan Lamasi Kabupaten Lawu. telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yaitu: penurunan beban pengeluaran masyarakat melalui bantuan langsung tunai, bantuan sosial, program keluaran harapan, bantuan bedah rumah, dan program Indonesia pintar. Implementasi strategi pemerintah dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGS) guna pengentasan kemiskinan di Kecamatan Lamasi Kabupaten Lawu. sudah dilakukan dengan baik, berdasarkan strategi yang dimulai dengan perumusan menyusun APBDesa sesuai dengan UU

¹⁰ Endah Tarwiyani Yuniar, Hermi Susiatiningsih, And Fendy Eko Wahyudi, 'Budaya Dalam Agenda 2030: Upaya Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals Di Kota Pekalongan', *Journal Of International Relations*, 8 (2022), 217–31 <[Http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Jihiwebsite:Http://Www.Fisip.Undip.Ac.Id](http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Jihiwebsite:Http://Www.Fisip.Undip.Ac.Id)>.

dan peraturan yang berlaku serta menyusun kegiatan ke dalam RKPDesa dan APBDesa tepat sasaran.¹¹

Tabel 1. 1 Posisi Penelitian

NO	NAMA PENELITI DAN JUDUL	JENIS PENELITIAN DAN ALAT ANALISA	HASIL
1	Ishartono dan Santoso Tri Raharjo “Sustainable Development Goals (SDGs) Dan Pengentasan Kemiskinan” (2020)	Jenis penelitian: pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Alat analisis : menggunakan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.	Problem kemiskinan sangat terkait dengan pekerjaan sosial. Profesi ini telah berjuang dan terlibat dalam memerangi kemiskinan selama berabad-abad. Secara historis, dapat dikatakan bahwa masalah kemiskinan adalah inspirasi bagi profesi Pekerjaan Sosial. Bahkan, profesi ini menempatkan kemiskinan sebagai salah satu fokus Pekerjaan Sosial. Pekerjaan Sosial harus berada di depan dalam memerangi kemiskinan jika benar-benar mempertahankan Hak-Hak Asasi Manusia. Tujuan pembangunan jangka panjang, seperti Millenium Development Goals (MDGs), yang kemudian diubah menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), membutuhkan kerja sama antar lembaga vertikal dan horizontal.
2	Dudi Septiadi dan Muhammad Nursan ” pengentasan kemiskinan Indonesia: analisis indikator	Metode yang digunakan pada penelitian adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif.	Hasil dari penelitian ini mengenai perkembangan kemiskinan Indonesia bahwa Tingginya angka kemiskinan dipicu oleh apresiasi nilai tukar rupee terhadap dolar. Perusahaan dengan utang dolar harus menghadapi kenyataan ini.

¹¹ K A B Luwu, ‘Strategi Pemerintah Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (Sdgs) Guna Pengentasan Kemiskinan Di Kec . Lamasi Strategi Pemerintah Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (Sdgs) Guna Pengentasan Kemiskinan Di Kec . Lamasi’, 2023. [Http://Repository.Iainpalopo.Ac.Id/Id/Eprint/8075/](http://Repository.Iainpalopo.Ac.Id/Id/Eprint/8075/).

	makroekonomi dan kebijakan pertanian” (2020)		Perusahaan bertanggung jawab mengeluarkan biaya yang lebih tinggi untuk melunasi utangnya. Oleh karena itu, banyak usaha skala kecil Perusahaan-perusahaan besar mulai bangkrut. Jadi efek dominonya adalah gelombang PHK dan kenaikan inflasi. PHK massal dan harga tinggi menyebabkan jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan semakin meningkat. Tingkat kemiskinan di Indonesia Rasakan tren yang sedang berlangsung Berkurang tapi layak mengalami resesi pelan - pelan. miskin Mengalami tren penurunan, Namun tingkat ketimpangan Distribusi pendapatan Indonesia sebenarnya mengalami peningkatan dan Termasuk dalam kategori ketimpangan Kritis. jika ketimpangan terus berlanjut Jika hal ini terjadi secara ekstrem, maka hal itu akan terjadi Semakin tinggi angkanya Selalu saja orang-orang miskin. penduduk awal yang miskin atau petani Melarikan diri dari jerat menjadi semakin sulit miskin
3	Adi Nawir, Syamsuddin Dan Jusniaty. ”Penerapan Program Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Polewali Dalam Mengurangi Kemiskinan” (2022)	Jenis penelitian: Kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Alat analisis : menggunakan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.	Dalam penelitian ini menemukan hasil dari program Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Polewali telah diterapkan sesuai dengan surat edaran Kementerian Desa tentang pelaksanaan Program SDGs. Meskipun program ini masih dalam tahap perencanaan, masyarakat Desa Polewali masih belum merasakan hasil implementasi SDGs, tetapi SDGs telah dilaksanakan dengan baik. Dengan mempertimbangkan fakta bahwa pemerintah desa memberikan pendataan langsung kepada masyarakat, dengan

			pembaharuan data setiap tiga bulan, pendataan ini akan menjadi acuan bagi pemerintah desa untuk membuat perencanaan desa, mulai dari perencanaan pembangunan dan rencana untuk menangani kemiskinan secara khusus.
4	Tantyo Nandi Purwoko "Implementasi Program Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Bandar Lampung" (2023)	Jenis penelitian: jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Alat analisis : Peneliti mengolah data berupa program-program Sustainable Development Goals (SDGs) di Kota Bandar Lampung, garis kemiskinan di Kota Bandar, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks kepadatan kemiskinan di Kota Bandar Lampung,	Hasil dari penelitian ini adalah mengenai program Sustainable Development Goals (SDGs) yang mana sebagai acuan sebagai program penanggulangan kemiskinan di kota bandar lampung kurang berhasil. Yang mana hal itu disebabkan oleh sumber daya manusia yang ada sudah baik namun belum sempurna menuju program SDGs sehingga nantinya ada perbaikan yang di perlukan agar bisa berjalan dengan implementasi yang dilakukan.
5	Ghulam Zakiyyan Dzulqarnain, Dine Meigawati dan Yana Fajar Basori. "Implementasi Program Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Sukabumi"	Jenis penelitian: jenis penelitian deskriptif Alat analisis : menggunakan rancangan non probability sampling dengan teknik snowball sampling. Snowball sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya sedikit,	Hasil dari penelitian ini yaitu pada pelaksanaan program SDGs di ketahui oleh para pelaksana sehubungan dengan adanya surat keputusan pokja yang dikeluarkan oleh Walikota akan tetapi belum terlalu dipahami mengenai SDGs lebih mendalam sehingga perlu adanya pemahaman lebih lanjut mengenai arti dari SDGs secara komprehensif. Sumber daya anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan program SDGs ini mengalami beberapa masalah. Salah satunya adalah pandemi

	(2022)	lama-lama menjadi besar	COVID-19, yang menyebabkan refokusing anggaran, yang berdampak pada pelaksanaan program SDGs ini. Hal ini berdampak pada sumber daya manusia, yang terbatas dalam jumlah, sehingga pelaksanaan program menggunakan sumber daya manusia seadanya tetapi dengan kualitas yang jauh di atas rata-rata.
6	Nanda Bhayu Pratama, Eko Priyo Purnomo dan Agustiyara. " Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta" (2020)	Jenis penelitian: penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Alat analisis : Alat analisis dengan pengumpulan data yang bersumber dari buku, jurnal, dan dokumen lain yang relevan	Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan berbagai upaya untuk menghapus kemiskinan yang sejalan dengan SDGs. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan ini melalui beberapa program yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Program-program ini nantinya akan menjadi indikator untuk tercapainya tujuan dalam menghapus kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan secara keseluruhan, dengan asumsi setidaknya setengah dari semua masyarakat yang terdampak kemiskinan menurut definisi nasional; menerapkan sistem perlindungan dan upaya perlindungan sosial untuk semua masyarakat yang terdampak kemiskinan; membangun ketahanan terhadap bencana, peristiwa ekonomi, dan peristiwa sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin; dan, terakhir, memastikan bahwa semua orang memiliki hak yang sama

7	<p>Endah Tarwiyanti Yuniar, hermini susiatiningsih, Fendy eko Wahyuni.</p> <p>” Budaya dalam Agenda 2030: Upaya dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals di Kota Pekalongan”</p>	<p>Jenis penelitian: penelitian ini deskriptif.</p> <p>Alat analisis : Alat analisis dengan pengumpulan data yang bersumber dari buku, jurnal, dan dokumen lain yang relevan</p>	<p>Hasil penelitian ini ditemukan bahwa kota pekalongan bisa menyesuaikan kebijakan aturan yang disepakati oleh UCCN dengan kata lain pemerintah pekalongan patuh terhadap kerja sama yang telah disepakati. Motivasi Pemkot Pekalongan untuk mematuhi UCCN bisa jadi Alasan mengapa saya mengatakan hal ini adalah karena tujuan UCCN adalah menjadikan kebudayaan sebagai inti pembangunan.</p> <p>Kota kreatif yang memenuhi ciri khas Kota Pekalongan sebagai kota industri Dikembangkan dari tradisi yang sudah lama ada. Selain itu, tujuan UCCN adalah untuk Sejalan dengan niat Kota Pekalongan untuk mewujudkan kota ekonomi kreatif yang layak Tidak dengan Peraturan Presiden. Rencana Pembangunan Ekonomi Nomor 142 Tahun 2018 Kompetisi Kreatif Nasional 2018-2015. Sebagai anggota UCCN, Pemerintah Kota Pekalongan harus melaksanakannya Semua komitmen dan tugas disepakati. Sesuai dengan komitmen yang disepakati, Anggota harus memperkuat kerja sama dengan kota-kota yang teridentifikasi Kreativitas sebagai faktor strategis bagi pembangunan berkelanjutan sektor ekonomi, masyarakat, budaya dan lingkungan hidup. Sudah sepantasnya perilaku Pemerintah Kota Pekalongan Melaksanakan tugas yang disepakati melalui berbagai indikator. Indeks Hal ini menunjukkan betapa besarnya upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan. Menjadikan budaya sebagai inti pembangunan</p>
---	--	--	---

			berkelanjutan Tujuan yang ingin dicapai UCCN. Indikator keluaran menunjukkan berbagai kebijakan dan peraturan daerah yang berpusat pada pelestarian budaya.
8	Hastija “ strategi pemerintah dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGS) guna pengentasan kemiskinan di kec., lamasi kab.lawu	Jenis penelitian deskriptif Alat analisis dilakukan dengan cara reduksi data, proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi.	Hasil penelitian bahwa strategi pemerintah dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGS) guna pengentasan kemiskinan di kec, lamasi kab.lawu. telah sesuai dengan RPJMN yaitu: penurunan beban pengeluaran masyarakat melalui bantuan langsung tunai, bantuan sosial, program keluaran harapan, bantuan bedah rumah, dan program Indonesia pintar. Implementasi strategi pemerintah dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGS) guna pengentasan kemiskinan di kec, lamasi kab.lawu. sudah dilakukan dengan baik, berdasarkan strategi yang dimulai dengan perumusan menyusun APBDesa sesuai dengan UU dan peraturan yang berlaku serta menyusun kegiatan ke dalam RKPDesa dan APBDesa tepat sasaran

1.5 Konsep Pendekatan

1.5.1 Sustainable Development Goals (SDGS)

Konsep Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan konsep yang dibentuk oleh PBB untuk menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan dan adil, Tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang lebih dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang berawal dari disepakatinya dokumen The Future We Want dalam UN Conference on Sustainable Development 2012. SDGs

merupakan sebuah program keberlanjutan dari millennium development goals (MDGs), Yang rencananya program ini akan berakhir pada 2030. Terdapat 17 tujuan dan 169 sasaran yang dirumuskan oleh PBB beserta negara-negara Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), yang mana berbeda dengan MDGs hanya memiliki 8 tujuan dan 21 sasaran.¹²

Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang bisa mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pada 2015, Millennium Development Goals (MDGs). Pada konsep SDGs ini merupakan lanjutan dari konsep Millenium Development Goals (MDGs) di mana konsep itu sudah berakhir pada tahun 2015, oleh karena itu kerangka pembangunan yang berkaitan pada perubahan situasi dunia yang pada awalnya menggunakan konsep dari MDGs sekarang diganti dengan konsep SDGs. Terdapat tiga pilar yang menjadi sebuah indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu, yang pertama (human development) indikator yang melekat pada pembangunan manusia diantaranya kesehatan, pendidikan. Pada indikator yang kedua (Social Economic Development) yang melekat pada lingkungan terkecil, seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi. Dan indikator ketiga melekat pada lingkungan yang lebih besar (Environmental Development) seperti ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik.¹³

¹² Sindy Yulia Putri, 'Implementasi Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) Pada Kasus Stunting Di Indonesia', *Jurnal Pir: Power In International Relations*, 5.2 (2021), 163 <<https://doi.org/10.22303/Pir.5.2.2021.163-174>>.

¹³ Wahyuningsih Wahyuningsih, 'Millenium Developoment Goals (Mdgs) Dan Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Kesejahteraan Sosial', *Bisma*, 11.3 (2018), p. 390, doi:10.19184/bisma.v11i3.6479.

Jika dikaji dari studi hubungan internasional, konsep SDGs sebagai landasan penting dalam kerja sama antara negara dan organisasi internasional yang berupaya dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Ada beberapa aspek konsep SDGs dalam hubungan internasional antara lain:

- a. Negara-negara di seluruh dunia ingin bekerja sama dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Kerja sama yang melibatkan pertukaran teknologi, pengetahuan, dan sumber daya antar negara.
- b. Organisasi internasional, seperti perserikatan bangsa-bangsa memiliki peran yang penting untuk memfasilitasi kerja sama internasional dan melakukan koordinasi upaya bersama
- c. Diplomasi internasional harus dipandu dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, negara-negara bisa bekerja sama dengan tujuan untuk menciptakan kebijakan, perjanjian, dan inisiatif yang mendukung pencapaian SDGs.
- d. Upaya bersama yang diperlukan sebagai mengatasi tantangan lingkungan global, yaitu kehilangan keanekaragaman hayati dan perubahan iklim. Dalam kerja sama internasional pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan sangat krusial.

Konsep SDGs merupakan konstruksi dari berbagai studi ilmu, mulai dari studi pembangunan, studi relasi antar negara, relasi antarbangsa, peran state dan non-state dalam pembangunan, globalisasi, transfer of knowledge, transfer of Technology, dan ekonomi politik internasional. Oleh karena itu maka unit analisis SDGs juga beragam mulai dari pemerintah, aktivis, hingga individu.

Peraturan menteri desa pada pembangunan dan transmigrasi nomor 13 tahun 2020 yang berisi tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2012, terdapat setidaknya 18 tujuan dan sasaran pembangunan melalui SDGs Desa yaitu 1) Desa tanpa kemiskinan, 2) Desa tanpa kelaparan, 3) Desa sehat dan sejahtera, 4) Pendidikan desa berkualitas, 5) Desa kesetaraan gender, 6) Desa layak air bersih dan sanitasi layak, 7) Desa yang berenergi bersih dan terbarukan, 8) Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa, 9) Inovasi dan infrastruktur desa, 10) Desa tanpa kesenjangan, 11) Kawasan pemukiman desa berkelanjutan, 12) Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan, 13) Pengendalian dan perubahan iklim desa, 14) Ekosistem laut desa, 15) Ekosistem darat desa, 16) Desa damai dan berkeadilan, 17) Kemitraan dan pembangunan desa, 18).Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.¹⁴

Selain itu penelitian ini menggunakan konsep intermestik, intermestik adalah singkatan dari internasional dan domestik yang di yakini sebagai pendekatan dalam kajian mengenai tentang isu, kebijakan dan ide atau norma domestik yang memiliki keterkaitan dengan isu, kebijakan serta juga norma global, keterkaitan itu dapat berbentuk pengaruh, dampak atau sebuah respon. Istilah dari intermestic pertama kali digunakan oleh Henry Kissinger pada tahun 1970 untuk menjelaskan mengenai isu isu internasional yang berimplikasi terhadap ekonomi nasional Amerika Serikat, di indonesia sendiri intermestik di populerkan oleh

¹⁴ Kelurahan Tirtorahayu, “Sdgs Desa: Pengertian, Tujuan Dan Sasaran “, <https://Tirtorahayukulonprogo.Desa.Id/Index.Php/Artikel/2021/6/24/Sdgs-Desa-Pengertian-Tujuandansasaran#:~:Text=Sdgs%20desa%20adalah%20upaya%20terpadu,Percepatan%20pencapaian%20tujuan%20pembangunan%20berkelanjutan>, Diakses Pada 7 Januari 2024.

menteri luar negeri yaitu, Hasan Wirayuda pada tahun 2002 yang memandang adanya keterkaitan antara isu domestik dengan kebijakan luar negeri Indonesia.¹⁵

Isu-isu global seperti pengentasan kemiskinan, demokratisasi serta desentralisasi, terorisme, gender, HAM, masalah lingkungan, dapat menjadi isu-isu intermestik jika masalah-masalah tersebut memiliki pengaruh atau berdampak oleh publik domestik.¹⁶ Konsep intermestik berkembang bersamaan dengan laju globalisasi. Salah satu ciri utama globalisasi adalah meningkatnya hubungan saling ketergantungan antar negara. Globalisasi membawa tantangan dalam memahami kebijakan publik, di mana kebijakan domestik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga oleh kebijakan dan referensi global. Akibatnya, sulit untuk membedakan antara kebijakan yang didorong oleh politik dalam negeri dan kebijakan yang dipengaruhi oleh politik internasional, karena keduanya saling terkait.

Kebijakan luar negeri muncul dari adanya hubungan antara aspek internasional dan domestik, yang mencerminkan kepentingan dan permasalahan suatu negara. Dalam penelitian ini, konsep intermestik digunakan untuk memahami bagaimana kepentingan aktor-aktor domestik dan internasional berperan dalam pembuatan kebijakan. Konsep intermestik merujuk pada keterkaitan antara hubungan internasional dan domestik, yang menggambarkan bagaimana berbagai

¹⁵ Kusumaningrum, D. N., & Kurniawati, D. E. (2016). Intermestik sebagai Pendekatan Studi Hubungan Internasional: Pengantar dan Contoh Penelitian. Penerbit LeutikaPrio. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=oS96DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=konsep+intermestik&ots=M8OQFCxHCO&sig=eisGBjfOT9o0IekjqQobRGoWsv0&redir_esc=v#v=onepage&q=konsep%20intermestik&f=false

¹⁶ Ibid

isu di kedua ranah tersebut menghasilkan fenomena, kebijakan, ide, dan nilai-nilai tertentu.

Dalam konteks pengentasan kemiskinan melalui SDGs di Desa Sekapuk, konsep intermestik bisa diterapkan karena kebijakan domestik terkait pengentasan kemiskinan sering kali dipengaruhi oleh komitmen internasional, seperti penerapan SDGs yang merupakan kesepakatan global. Program-program yang dijalankan oleh pemerintah desa sering kali didorong oleh inisiatif global, dan keberhasilan dalam pencapaiannya bisa berkontribusi pada target global SDGs. Ini menunjukkan bagaimana kebijakan dan program domestik memiliki keterkaitan erat dengan agenda internasional.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam menganalisis Penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan objek dan fenomena yang ingin diteliti.¹⁷ Penelitian deskriptif bersifat menggambarkan dan melukiskan suatu hal yang diperoleh dari lapangan dan selanjutnya menjelaskannya dengan kata-kata, dengan penelitian deskriptif ini peneliti ingin membuat suatu gambaran secara menyeluruh tentang pelaksanaan dari program Sustainable Development Goals (SDGs) oleh pemerintah Kabupaten Gresik dalam mengurangi kemiskinan.

¹⁷ 2020 Adhi Kusumastuti Et Al., *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, 2011 <[https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/Pengantar Metodologi Penelitian.Pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/Pengantar%20Metodologi%20Penelitian.Pdf)>.

1.6.2 Metode Analisa Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah penggunaan data kualitatif yang dimana metode penelitian ini pada dasarnya dikatakan sebagai salah satu cara untuk mengetahui dan mendapatkan serta membuktikan data yang ingin dikemukakan, dibuktikan serta juga dikembangkan oleh suatu pengetahuan yang bisa digunakan dalam memahami mengantisipasi masalah serta juga untuk memecahkan masalah dalam suatu bidang Pendidikan.

Penggunaan Metode Analisis data dalam penelitian ini yang bersifat valid maka diperlukan suatu metode penelitian dalam proses pengerjaannya, metode penelitian yang dianggap sebagai sebuah cara atau sebuah teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan dan juga dalam proses menganalisis data yang akan digunakan dengan tujuan menemukan suatu hal yang bersifat memberikan sebuah pemahaman terkait pada topik yang diangkat dalam penelitian ini.¹⁸ Metode analisis sosial yang digunakan dalam penelitian tanpa kemiskinan yang mana melibatkan pada identifikasi faktor-faktor ekonomi, sosial, dan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di masyarakat, serta mengevaluasi pada efektivitas program-program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang rentan.

1.6.3 Teknik Dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan melalui sumber-sumber yang terpercaya seperti jurnal, artikel ilmiah, buku dan

¹⁸ *Ibid*

berbagai situs lainnya yang dianggap relevan pada topik penelitian ini, adapun dengan studi lapangan yang mana pengumpulan data atau informasi melalui kegiatan penelitian dengan langsung turun ke lokasi penelitian untuk mencari fakta terkait dengan masalah yang diteliti serta dengan mewawancarai sumber yang bersangkutan yakni, bapak kepala Desa Sekapuk, terdapat 3 instrumen penelitian yang digunakan, yaitu:

1. observasi,

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data dikumpulkan dan dibantu dengan berbagai alat Hasil dari observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga ada peneliti yang ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam. Peneliti kemudian menentukan key informan yang diperoleh dari rekomendasi pihak yang memahami kegiatan. Proses wawancara dilakukan dengan menggunakan interview guide (panduan wawancara) sebagai pedoman menentukan gagasan pokok yang akan digali sehingga

lebih efektif dan efisien. Adapun wawancara akan dilakukan kepada bapak Mundhor selaku narasumber dari sekretaris Desa Sekapuk, bapak ridho'i selaku PJ kepala Desa Sekapuk dan bapak arif susanto selaku warga Desa Sekapuk. Wawancara ini dilakukan untuk menggali informasi mengenai upaya pemerintah Desa Sekapuk dalam upaya pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan SDGs poin I.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode ini digunakan dengan pengumpulan data yang bersifat dokumentasi atau catatan yang telah ada. Penulis menggunakan metode ini sebagai upaya mendapatkan data-data yang lebih objektif dan jelas yang berisi tentang yang dilakukan pemerintah Desa Sekapuk.

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian

a. Batasan Materi Penelitian

Terdapat batasan pada sebuah materi agar tetap pada topik penelitian ini tidak bersifat umum melainkan lebih spesifik, batasan materi disini guna untuk memperjelas objek penelitian dan mempermudah proses pada pengumpulan data. Batasan materi dalam penelitian adalah lebih berfokus pada Sustainable Development Goals (SDGs) pada tujuan 1 dan Upaya Pengentasan Kemiskinan di Desa Sekapuk Kecamatan Ujung pangkah Kabupaten Gresik.

b. Batasan Waktu Penelitian

Batasan waktu yang digunakan adalah dari akhir tahun 2017 hingga sekarang tahun 2024. penggunaan tahun 2017 dikarenakan pada tahun tersebut tercatat bahwa pada Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Sekapuk hanya mencapai 0.55%, dan desa tersebut juga memiliki segudang permasalahan dari masa ke masa diantaranya adalah kemiskinan, terbelakang, lingkungan yang kumuh serta BUMDes yang stagnan dan tidak berkembang¹⁹ Kemudian dari tahun ke tahun pemerintah Desa Sekapuk berupaya melakukan perbaikan dan menghasilkan peningkatan dari segi pembangunan, perbaikan infrastruktur desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

1.7 Argumen Pokok

Sustainable Development Goals pada poin pertama merupakan landasan bagi Agenda 2030 secara keseluruhan, karena pengentasan kemiskinan adalah kunci untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan umum. Kemajuan dalam tujuan SDG lainnya akan sulit dicapai jika kemiskinan tidak diatasi. Pengaruh kemiskinan terhadap kehidupan kemiskinan, Kemiskinan memiliki dampak negatif yang signifikan pada kesehatan manusia. Ini mencakup akses yang terbatas terhadap makanan, perawatan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan perumahan yang layak. Akibatnya, mengakhiri kemiskinan adalah tanggung jawab moral dan etika. Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, mengakhiri kemiskinan adalah komitmen global. Analisis ini mengukur kemajuan dalam mencapai tujuan

¹⁹ Erlinda Choirunnisa And Others, 'Peran Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Dalam Mewujudkan Desa Miliarder', *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi & Sosial*, 10.2 (2021), 2354–7693 <[Http://Ejournal.Unmus.Ac.Id/Index.Php/Societas](http://Ejournal.Unmus.Ac.Id/Index.Php/Societas)>.

SDG Poin 1 dan membantu menjelaskan rencana dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya.

Pemerintah daerah memiliki keterkaitan langsung dalam perencanaan dan juga pada implementasi pada program pengentasan kemiskinan, dengan masih tingginya angka kemiskinan pada Kabupaten Gresik menjadi perhatian yang serius pemerintah daerah untuk terus merencanakan program-program yang bisa mengurangi angka kemiskinan. Desa Sekapuk sendiri dipilih sebagai studi kasus karena pada Desa Sekapuk memiliki karakteristik yang unik dan mewakili tantangan kemiskinan, penelitian yang mendalam terhadap pengalaman Desa Sekapuk akan memberikan gambaran yang konkret mengenai efektivitas kebijakan dan juga program pengentasan kemiskinan.

1.8 Sistematika Penulisan

Tabel 1. 2 Sistematika Penulisan

BAB	Bahasan pokok
<p>BAB I</p> <p>PENDAHULUAN</p>	<p>1.1 Latar Belakang Masalah</p> <p>1.2 Rumusan Masalah</p> <p>1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian</p> <p>1.3.1 Tujuan Penelitian</p> <p>1.3.2 Manfaat Penelitian</p> <p>a. Manfaat akademis</p> <p>b. Manfaat praktis</p>

	<p>1.4 Penelitian Terdahulu</p> <p>1.5 Kerangka Teori</p> <p> 1.5.1 Konsep SDGs</p> <p>1.6 Metodologi Penelitian</p> <p> 1.6.1 Jenis Penelitian</p> <p> 1.6.2 Metode Analisa Data</p> <p> 1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian</p> <p> a. Batasan waktu penelitian</p> <p> b. Batasan materi penelitian</p> <p> 1.6.4 Teknik Dan Alat Pengumpulan Data</p> <p>1.7 Argumen Pokok</p> <p>1.8 Sistematika Penulisan</p>
<p>BAB II</p> <p>SDGS Dan Upaya</p> <p>Pengentasan Kemiskinan Di</p> <p>Indonesia</p>	<p>2.1 Pengertian Sustainable Development Goals</p> <p>2.2 Kemiskinan Di Indonesia</p> <p>2.3 Kebijakan Pemerintah Gresik Mengenai Sdgs No Poverty</p>
<p>BAB III</p> <p>Upaya Pengentasan</p> <p>Kemiskinan Di Desa</p> <p>Sekapuk Kecamatan</p> <p>Ujungpangkah Kabupaten</p> <p>Gresik</p>	<p>3.1 Gambaran umum Desa Sekapuk</p> <p> 3.1.1 sejarah Desa Sekapuk</p> <p> 3.1.2 visi dan misi Desa Sekapuk</p> <p>3.2 Implementasi Pemerintah Desa Sekapuk Dalam Penurunan Angka Kemiskinan</p>

	<p>A. Strategi Pemerintah Desa Sekapuk Dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Layanan Pendidikan</p> <p>B. Strategi Pemerintah Desa Sekapuk Dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Layanan kesehatan</p> <p>3.3 Kendala Perwujudan Sustainable Development Goals (Sdgs) Di Desa Sekapuk</p>
BAB IV	4.1 Kesimpulan
PENUTUP	4.2 Saran
DAFTAR PUSTAKA	